



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan kedudukan dan kualitas peran perempuan dalam pembangunan, diperlukan suatu wujud nyata melalui Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai landasan hukum dan pedoman dalam Rencana Aksi Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kota Blitar Tahun 2016-2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki -laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pengarusutamaan gender.

Pasal 2

RAD PUG dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sistematika RAD PUG Kota Blitar, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

BAB II. KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah
- B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

BAB III. KONDISI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BLITAR

- 3.1. Kependudukan
- 3.2. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
- 3.3. Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan
 - 3.3.1. Bidang Ekonomi
 - 3.3.1.1. Ketenagakerjaan
 - 3.3.1.2. KUKM
 - 3.3.1.3. Perdagangan dan industry
 - 3.3.1.4. Pertanian
 - 3.3.1.5. Perhubungan
 - 3.3.1.6. Iptek
 - 3.3.2. Politik, Sosial & Hukum
 - 3.3.2.1. Politik
 - 3.3.2.2. Sosial
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan

- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Karang Taruna
- e. Panti Sosial
- f. Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak

BAB IV. RENCANA AKSI

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran
- 4.4. Kebijakan
- 4.5. Strategi

BAB V. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku Ketua Kelompok Kerja PUG Kota Blitar mengkoordinasikan dan mengevaluasi kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung program pengarusutamaan gender antara Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait dan APBD Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Agustus 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 22 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

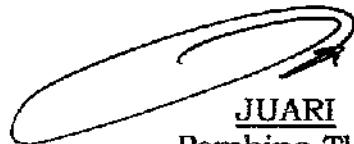
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG)
KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah gender difahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Pada dasarnya, gender adalah salah satu konsep sosial yang dikonstruksi seiring dengan berkembangnya persoalan sosial yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup suatu budaya, tradisi, norma dan pemahaman dari suatu agama (sumber-sumber ajaran agama yang bersifat normatif doktrin). Istilah ini merujuk pada peran laki-laki dan perempuan dalam bentukan budaya dan bukan jenis kelamin. Gender merupakan istilah yang dianggap baru karena istilah tersebut muncul seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial walaupun pada dasarnya fakta atau kejadian yang terkait dengan isu-isu gender sudah terjadi di masyarakat jauh sebelum gender diteorikan secara baku dan formal bahkan menjadi suatu disiplin ilmu secara mandiri. Gender sebagai istilah yang dianggap baru pada prinsipnya adalah proses membahasakan, melakukan penamaan atau memberi simbol terhadap perilaku dan sikap tertentu serta fenomena yang sesungguhnya telah lama ada dan berlaku ditengah kehidupan manusia. Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang seringkali tumpang tindih dengan konsep sex (faktor biologis) sebagai kodrat Tuhan yang secara permanen memang berbeda. Sementara gender merupakan suatu produk pemahaman dan ekspektasi secara cultural yang bersifat "*changeable*" terhadap jenis kelamin tertentu.

Tahapan dan perkembangan Pembangunan gender dalam RPJPN tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkesetaraan gender. Untuk arah kebijakan atau isu nasional terkait dengan pengarusutamaan gender sendiri, RPJMN memfokuskan tiga isu strategis yaitu; Pertama, Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksananya disemua tingkat pemerintahan dengan melibatkan pemangku kepentingan; Kedua, peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan,

layanan dan pemberdayaan; Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha pencepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. Strategi ini merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2000 yaitu Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing .

Sehubungan hal-hal di atas, untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di Kota Blitar secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Kota Blitar perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Kota Blitar dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kota Blitar.

1.2. Tujuan Penyusunan

1. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) disusun sebagai panduan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.

2. Memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.3. Dasar Hukum

1. Sila kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
2. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat IPTEK, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB);
13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik (SIPOL);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Di Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, didalamnya mengatur hak-hak anak dalam pencatatan sipil, misalnya: Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
25. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013;
26. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2013;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Program Menuju Kantin Sehat Sekolah di Kota Blitar;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pemberian Subsidi Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Kota Blitar;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Kota Layak Anak Kota Blitar;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar;
31. Keputusan Walikota Nomor : 188/466/HK/410.010.2/2010 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar;
32. Keputusan Walikota Nomor : 188/192/HK/410.010.2/2011 Tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar, merupakan komisi untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan, perdagangan anak (trafficking) dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak serta meminta saran pertimbangan serta rekomendasi kepada semua pihak dan atau para ahli untuk melaksanakan tindak rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi agar tercipta rasa aman bagi korban, pelapor dan saksi;
33. Surat Keputusan Walikota Blitar No. 188/358/HK/410.010.2/2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar ;
34. Surat Keputusan Walikota Nomor 188/358/HK/410.010.2/2014 tentang Tim Pengurus Harian KPA Kota Blitar;
35. Surat Keputusan Walikota Nomor 188/345/HK/410.010.2/2015 Tentang komisi Penanggulangan Aids Kota Blitar;
36. Surat Keputusan Walikota Nomor 188/427/HK/410.010.2/2015 Tentang Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

- (PANPEL RANHAM) Kota Blitar;
37. Surat Keputusan Walikota Nomor 188/484/HK/410.010.2/2015 Tentang Penerima Penghargaan Akseptor Keluarga Berencana (KB) Medis Operasi Pria (MOP)/ Vasektomi Kota Blitar;
 38. Surat Keputusan Walikota Nomor 188/556/HK/410.010.2/2015 Tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

BAB II

KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu :

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelembagaan pengelolaan PUG

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam mewujudkan PUG, ada 7 (tujuh) prasyarat yang dilaksanakan yaitu:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Alat ANALisis Gender
6. Data Gender
7. Partisipasi Masyarakat.

Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point PUG. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011). Regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota , Surat Keputusan Walikota, maupun surat edaran penting yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan PUG harus didukung dengan berbagai regulasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender maka dibentuk Pokja PUG dengan anggota seluruh Kepala SKPD dan Tim Teknis Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor:188/78/HK/410.010.2/2004 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar yang diperbarui kembali dengan Keputusan Walikota Nomor : 188/466/HK/410.010.2/2010 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar. Pokja PUG ini mempunyai tugas:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan dimaksud di masing-masing SKPD.
2. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan PUG.
3. Menyusun program kerja PUG.
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD.
5. Menyampaikan laporan dan kegiatan Pokja PUG.

Pada tingkat SKPD dibentuk Focal Point SKPD, sayangnya hingga kini belum seluruh SKPD memiliki Focal Point. Pembentukan Focal Point ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. Focal point terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perwakilan tiap bidang yang ada. Adapun tugas dari focal point yaitu:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran skpd yang responsive gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. Melaporkan pelaksanaan pug kepada pimpinan SKPD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-SKPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2010. metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis
 - a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.
 - b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan
 - a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpisah menurut jenis kelamin.
 - b. Data terpisah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender
Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal
Temukan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal

Temukan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarkhi, gender *stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).

6. Reformulasi Tujuan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsive gender.

7. Rencana Aksi

a. Menetapkan rencana aksi.

b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.

8. Data Dasar.

a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress)

b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.

9. Indikator Gender

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BLITAR

3.1. Kependudukan

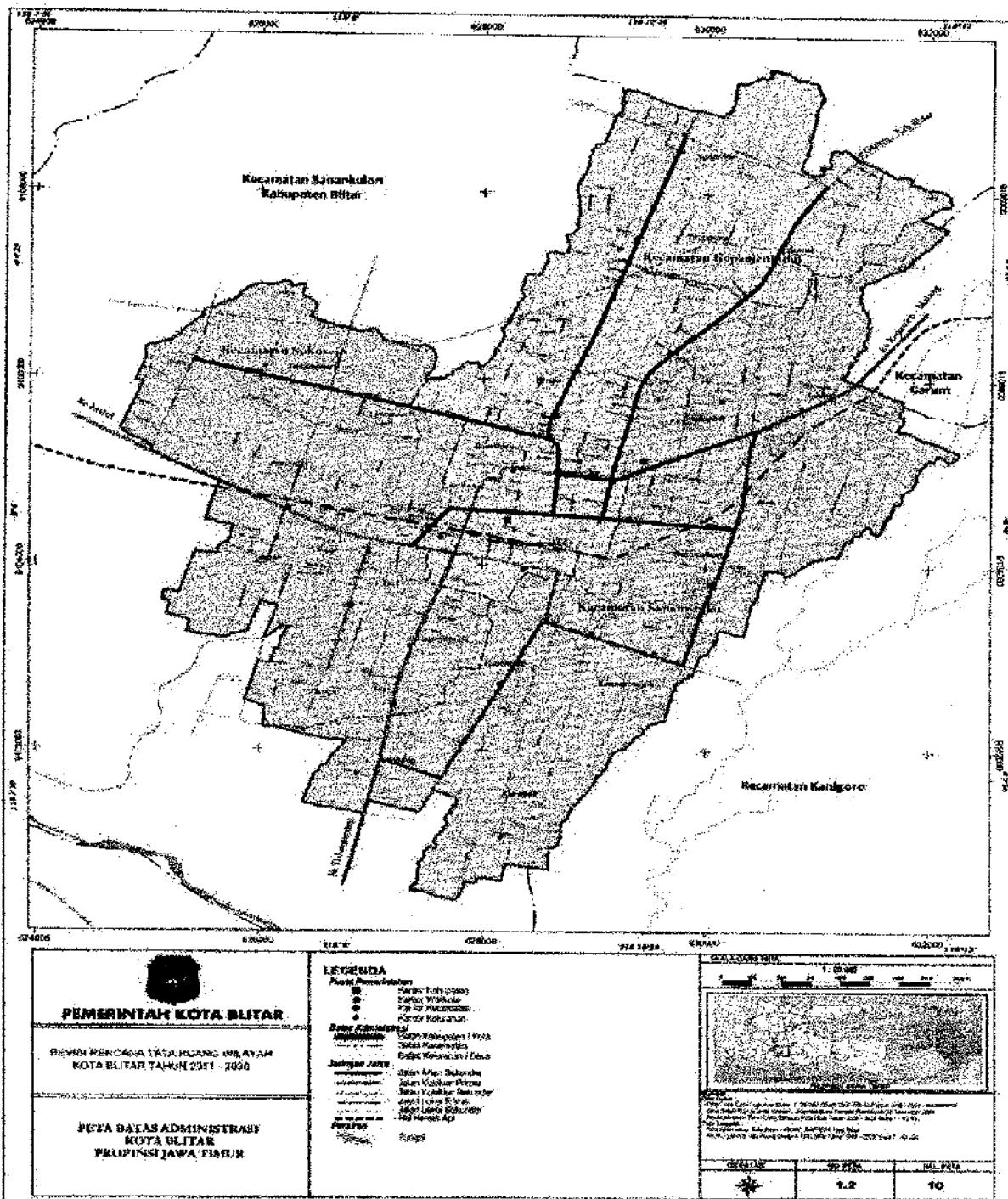
Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang berbentuk Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di selatan Jawa Timur pada koordinat $112^{\circ} 14'$ - $112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2'$ - $8^{\circ} 8'$ Lintang Selatan. Kota Blitar mempunyai wilayah seluas 32.578 km^2 yang dikelilingi oleh Kab. Blitar. Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto dengan jarak 169 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya). Berikut adalah batas-batas wilayah Kota Blitar:

Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar
Selatan : Kec. Sanankulon dan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
Barat : Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok Kab. Blitar

Wilayah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dengan 20 kelurahan. Selanjutnya tahun

2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 dijadikan 21 Kelurahan hasil dari pemecahan Kelurahan Pakunden yang menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. Adapun peta administratif dan perincian luas wilayah masing-masing Kelurahan dan kecamatan adalah sebagai berikut :

Peta Administratif Kota Blitar



Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2014

No	Kelurahan	Luas (Km2)	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepala Keluarga			Kepadatan	Ratio Seks
			L	P		L	P	Total		
1.	KEPANJENKIDUL	0,867	3871	4116	7,987	1.918	559	2.447	9.212	0,940
2.	NGADIREJO	1,910	1732	1712	3,444	818	204	1.002	1.803	1,012
3.	SENTUL	2,683	3815	3862	7,677	1.813	386	2.119	2.861	0,988
4.	KAUMAN	0,680	3114	3206	6,320	1.426	356	1.782	9.294	0,971
5.	TANGGUNG	2,230	2705	2595	5,300	1.346	233	1.579	2.377	1,042
6.	BENDO	1,518	2763	2770	5,533	1.357	303	1.660	3.645	0,997
7.	KEPANJENLOR	0,613	2867	2908	5,775	1.290	428	1.718	9.421	0,986
	Kec. Kepanjenkidul	10,502	20,867	21,169	42,036	9.968	2.469	12.437		0,98
8.	PAKUNDEN	2,262	5200	5081	10,281	2.460	531	2.991	4.545	1,023
9.	BLITAR	1,332	2214	2286	4,500	1.086	254	1.336	3.378	0,969
10.	TLUMPU	1,015	1838	1811	3,649	904	192	1.096	3.595	1,015
11.	TURI	0,508	1536	1558	3,094	733	199	932	6.091	0,986
12.	KARANG SARI	0,882	2650	2596	5,246	1.260	326	1.586	5.948	1,021
13.	SUKOREJO	1,466	7107	7006	14,113	3.306	958	4.264	9.627	1,014
14.	TANJUNGSARI	2,458	4336	4207	8,543	2.086	396	2.478	3.476	1,031
	Kec. Sukorejo	9,925	24,881	24,545	49,426	11.827	2.856	14.683		1,031
15.	GEDOG	2,650	5299	5261	10,560	2.573	505	3.078	3.985	1,007
16.	PLOSO KEREP	1,248	2304	2327	4,631	1.103	277	1.380	3.711	0,990
17.	KLAMPOK	1,530	2215	2199	4,414	1.119	245	1.364	2.885	1,007
18.	SANAN WETAN	2,127	6713	6860	13,573	3.201	793	3.994	6.381	0,979
19.	REMBANG	0,844	1454	1531	2,985	740	190	930	3.537	0,950
20.	KARANG TENGAH	1,795	3608	3561	7,169	1.742	323	2.065	3.994	1,013
21.	BENDO GERIT	1,955	5108	5209	10,317	2.409	594	3.003	5.277	0,981
	Kec. Sananwetan	12,152	26,701	26,948	53,649	12.887	2.927	15.814		0,99
	KOTA BLITAR	32,579	72,449	72,662	145.111			42.934	4.455	0,997

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Tabel Kelahiran Penduduk menurut jenis kelamin dan kelurahan

No	Kelurahan/ Village	Kelahiran/ Birth			Kematian/ Death		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah /Total	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5			
1	Tlumpu	24	24	48	17	20	37
2	Karangsari	28	23	51	33	27	60
3	Turi	14	17	31	16	15	31
4	Blitar	35	20	55	19	24	43
5	Sukorejo	98	60	158	82	82	164
6	Pakunden	65	45	110	43	47	90
7	Tanjungsari	60	41	101	26	26	52
8	Kepanjenkidul	40	39	79	39	38	77
9	Kepanjenlor	46	26	72	28	31	59
10	Kauman	34	22	56	10	25	35
11	Bendo	39	35	74	32	14	46
12	Tanggung	31	31	62	30	23	53
13	Sentul	51	39	90	25	31	56
14	Ngadirejo	14	11	25	17	13	30
15	Rembang	15	17	32	22	5	27
16	Klampok	23	33	56	23	16	39
17	Plosokerep	41	39	80	18	12	30
18	Karangtengah	55	50	105	28	35	63

19	Sananwetan	88	65	153	62	57	119
20	Bendogerit	63	63	126	65	39	104
21	Gedog	61	47	108	40	41	81
	Kota Blitar						
	2014	925	747	1.672	675	621	1.296
	2013	976	800	1.875	663	699	1.362
	2012	1.018	927	1.945	643	592	1.240
	2011	987	896	1.883	597	637	1.234
	2010	943	918	1.861	579	596	1.169

Sumber: Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2014

Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut kategori umur

Kategori Umur	Jumlah Anak		Jumlah yang memiliki akta kelahiran		Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran
	L	P	L	P	
0-60 hari	1.008	993	870	828	82,86
61 hari-1 tahun	1.251	1.134	1.118	1.021	82,69
1 th - < 5 tahun	3.671	3.421	3.202	3.017	82,69
5 th - < 12 tahun	8.944	8.318	5.066	4.747	56,85
12 th - < 18 tahun	7.386	6.863	4.443	4.128	60,14
Jumlah	22.260	20.729	17.499	13.741	73,23%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, 2014

Data Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur Tahun 2014

NO	KELOM- POK UMUR	KECAMATAN								
		KEPANJEN KIDUL			SUKOREJO			SANANWETAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	0-3 thn	893	838	1,731	1,047	968	2,015	1,201	1,082	2,283
2	4-6 thn	1,026	980	2,006	1,240	1,131	2,371	1,351	1,243	2,594
3	7-12 thn	2,160	1,998	4,158	2,515	2,365	4,880	2,709	2,483	5,192
4	13-15 thn	1,035	958	1,993	1,257	1,217	2,474	1,354	1,309	2,663
5	16-18 thn	1,023	917	1,940	1,173	1,137	2,310	1,319	1,254	2,573
6	19-24 thn	1,803	1,777	3,580	2,161	2,224	4,385	2,420	2,324	4,744
7	25-29 thn	1,506	1,570	3,076	1,907	1,784	3,691	1,910	2,085	3,995
8	30-34 thn	1,953	1,935	3,888	2,352	2,312	4,664	2,370	2,424	4,794
9	35-39 thn	1,712	1,702	3,414	2,217	2,043	4,260	2,252	2,095	4,347
10	40-44 thn	1,632	1,609	3,241	1,943	1,898	3,841	1,979	1,975	3,954
11	45-49 thn	1,512	1,564	3,076	1,796	1,675	3,471	1,943	2,020	3,963
12	50-54 thn	1,229	1,378	2,607	1,502	1,670	3,172	1,623	1,895	3,518
13	55-59 thn	1,108	1,148	2,256	1,298	1,346	2,644	1,453	1,446	2,899
14	60-64 thn	862	911	1,773	980	946	1,926	1,071	1,137	2,208
15	65-69 thn	514	608	1,122	616	585	1,201	644	736	1,380
16	70-74 thn	417	508	925	411	502	913	544	580	1,124
17	> 75 thn	482	768	1,250	466	742	1,208	558	860	1,418
		20,867	21,169	42,036	24,881	24,545	49,426	26,701	26,948	53,649

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, 2015

3.2. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Pembangunan Gender suatu Kabupaten atau Kota dapat ditunjukkan dengan perolehan Indeks Pembangunan Gender sedangkan pemberdayaan gender suatu Kabupaten atau Kota dapat ditunjukkan dengan indeks pemberdayaan gender.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum penghitungan IPM masih tetap menggunakan 3 dimensi yaitu Umur panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, Standar Hidup Layak. Dari Ketiga dimensi tersebut komponen yang diukur adalah:

1. Angka Harapan Hidup.
 2. Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah yang digabung menjadi satu, yakni indeks pendidikan.
 3. Purchasing Power Parity/ kemampuan daya beli yang telah disesuaikan.
- Perkembangan IPM di Kota Blitar dan Kab/Kota sekitarnya sebagai berikut:

IPM Kota Blitar dan Kabupaten/Kota sekitarnya

No	Kab/Kota/Prop	IPM				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Blitar	72,56	73,08	73,53	74,53	75,26
2	Kab. Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88
3	Kota Kediri	72,20	72,93	73,66	74,18	74,62
4	Kab. Tulungagung	67,28	67,76	68,29	69,30	69,49
5	Propinsi Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa timur 2015

IPM Laki-laki dan Perempuan Kota Blitar dan Kabupaten/Kota sekitarnya

No	Kab/Kota/Prop	IPM laki-laki					IPM perempuan				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Blitar	72,98	73,43	73,83	74,75	76,06	71,06	71,67	72,09	73,06	74,71
2	Kab. Blitar	68,50	68,94	69,40	70,28	71,13	61,17	61,88	62,49	64,05	66,02
3	Kota Kediri	75,02	75,43	76,04	76,79	77,49	69,96	71,02	71,96	72,98	73,73
4	Kab. Tulungagung	70,11	70,24	70,61	71,56	71,84	65,09	65,52	65,94	67,36	68,33
5	Propinsi Jawa Timur	69,87	70,44	71,43	72,13	72,81	62,04	62,89	63,83	65,07	66,14

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa timur 2015

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, pada dasarnya hampir sama dengan penghitungan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

Mulai tahun 2014 metodologi penghitungan IPG mengalami perubahan dengan menggunakan metode baru sehingga terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, untuk melihat keberhasilan pembangunan gender angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Dengan metode baru interpretasi dari angka IPG berubah tidak perlu dibandingkan dengan angka IPM. Angka IPG berdiri sendiri, semakin besar/mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Perkembangan IPG Kota Blitar dapat dilihat sebagai berikut:

IPG Kota Blitar dan Kabupaten/Kota sekitarnya

No	Kab/Kota/Prop	IPG				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Blitar	97,37	97,60	97,63	97,74	98,23
2	Kab. Blitar	89,30	89,77	90,04	91,14	92,81
3	Kota Kediri	93,26	94,14	94,64	95,05	95,15
4	Kab. Tulungagung	92,84	93,28	93,39	94,12	95,11
5	Propinsi Jawa Timur	88,80	89,28	89,36	90,22	90,83

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa timur 2015

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, manajer, administrasi, dan teknisi, dan sumbangsih pendapatan.

IDG Kota Blitar dan Kabupaten/Kota sekitarnya

No	Kab/Kota/Prop	IDG				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Blitar	68,68	68,47	69,39	69,48	67,57
2	Kab. Blitar	66,59	63,33	66,65	63,99	75,42
3	Kota Kediri	70,94	71,92	74,31	74,50	80,92

4	Kab. Tulungagung	51,96	52,67	53,00	53,54	63,28
5	Propinsi Jawa Timur	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa timur 2015

3.3. Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan

3.3.1. Bidang Ekonomi

Pembangunan daerah tidak terlepas dari pembangunan bidang ekonomi karena menyangkut usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Kepala Rumah Tangga Miskin di Kota Blitar yang diperoleh dari data PPLS tahun 211 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kepala Rumah Tangga Miskin		
		L	P	Total
1	Sukorejo	2.030	545	2.575
2	Kepanjenkidul	1.146	361	1.507
3	Sananwetan	1.301	404	1.705
		4.477	1.310	5.787

Sumber: Data PPLS, 2011

Pembangunan gender pada bidang ekonomi ini meliputi sub bidang:

- 3.3.1.1. Ketenagakerjaan
- 3.3.1.2. KUKM
- 3.3.1.3. Jasa Keuangan
- 3.3.1.4. Perdagangan dan industry
- 3.3.1.5. Pertanian
- 3.3.1.6. Perhubungan
- 3.3.1.7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.3.1.1. Ketenagakerjaan

Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk **angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok kerja, dan sebagainya.

Penduduk yang termasuk **bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sedangkan **TPT**

(Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja memiliki angka yang cukup signifikan, namun keikutsertaan mereka dipengaruhi oleh umur, status perkawinan dan siklus rumah tangga. Survei Angkatan Kerja Perempuan di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penganggur Kota Blitar

NO	URAIAN	TAHUN							
		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Penduduk Usia Kerja	48.916	51.666	49.366	52.099	50.877	53.499	51.604	54.077
		100.582		101.435		104.376		105.681	
2.	Angkatan kerja	38.239	26.692	39.940	27.740	41.233	28.132	42.268	33.248
		64.931		67.680		69.365		75.516	
3.	Penganggur	772	1.531	3.215	997	2.676	1.287	1.668	1.198
		2.303		4.212		3.963		2.866	
4.	Jumlah penduduk bekerja	37.467	25.161	36.725	26.743	38.557	26.845	40.600	32.050
		62.628		63.468		65.402		73.650	
5.	TPT	2,02 %	5,74 %	8,05 %	3,59 %	6,49 %	4,57 %	3,94 %	3,6 %
		3,55 %		5,17 %		5,71 %		3,79 %	
6.	TPAK	78,17%	51,66%	80,96%	53,24 %	81,04%	52,58%	81,90%	61,48%
		64,56 %		66,72 %		66,46 %		71,45 %	

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2015

Keterangan :

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka :Jumlah penganggur/jumlah angkatan kerja X 100 %

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : jumlah angkatan kerja/jumlah usia kerja X 100 %

Data Pencari Kerja Ditempatkan Kota Blitar tahun 2011 – 2014

NO	URAIAN	JUMLAH		
		L	P	Total
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar 2014	273	368	641
	Pencari Kerja Yang Mendaftar 2015	133	124	257
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan 2014	273	368	641
	Pencari Kerja Yang Ditempatkan 2015			209

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2015

Jumlah Angkatan Kerja Perempuan di Kota Blitar 2014

Lokasi	Bekerja	Penganggur	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Blitar	28.132	25.367	53.499	4,57
Provinsi Jawa Timur	8.051.707	7.091.617	15.143.324	4,01

Sumber: Sakernas Jawa Timur, 2014, Diolah

Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Bukan Angkatan Kerja di Kota Blitar, Agustus 2014

Lokasi	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah

		Rumah Tangga		
Kota Blitar	4.394	19.322	1.651	25.367
Provinsi Jawa Timur	1.140.658	5.396.341	554.591	7.091.617

Sumber: Sakernas Jawa Timur, 2014, Diolah

Jumlah Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Blitar yang Termasuk Pekerja Tidak Penuh, Agustus 2014

Lokasi	Setengah Penganggur	Paruh Waktu	Pekerja Tidak Penuh
Kota Blitar	1.228	6.431	7.659
Provinsi Jawa Timur	660.875	2.861.906	3.522.781

Sumber: Sakernas Jawa Timur, 2014, Diolah

a. Angkatan Kerja Antar Daerah dan Antar Negara

Konsepsi tenaga kerja berdasarkan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah data angkatan kerja yang merujuk pada mobilitas pekerja antar wilayah administrasi dengan syarat pekerja melakukan pulang pergi seminggu sekali atau sebulan sekali. Dalam kaitanya dengan kesetaraan gender, maka dibutuhkan data AKAD yang dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah untuk mengukur serta menjadi landasan sebuah kebijakan agar dapat diukur secara komprehensif termasuk dari aspek kesetaraan gender. Hal ini merupakan kewenangan dari Provinsi Jawa Timur.

Data Angkatan Kerja Antar Daerah

Tahun	Jumlah
2011	80
2012	170
2013	170
2014	9

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Adapun gambaran data Angkatan Kerja Antar Negara (TKI) Kota Blitar sebagai berikut:

Tahun	Kec. Sananwetan					Kec. Kepanjenkidul					Kec. Sukorejo					Jumlah	Rentan Usia	
	L	%	P	%	Jml	L	%	P	%	Jm 1	L	%	P	%	Jm 1		L	P
2011	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35	*	*
2012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101	*	*
2013	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101	*	*
2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	144	*	*
2015	6		52		58	10		27		37	7		53		60	155	18-45	21-41

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

b. Pekerja di sektor formal

Lapangan kerja formal adalah lapangan kerja yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan, misalnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gambaran sebagian pekerjaan formal antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah.

Data Personil di Pengadilan Negeri Blitar

Tahun	Jumlah Hakim			Pernah Diklat SPPA	
	L	P	Jumlah	L	P
Hakim	7	3	10	-	1
Panitera	1	-	1	-	-
Panitera Muda	3	-	3	-	-
Panitera Pengganti	10	12	22	-	-
Jurusita	1	-	1	-	-
Jurusita Pengganti	9	2	11	-	-
Analisis laporan					
Jumlah 2015	33	17	48	-	1
2014	30	17	47	-	-
2013	30	16	46	-	-
2012	30	15	45	-	-
2011	29	17	46	-	-

Sumber: Pengadilan Negeri Blitar, 2015

Ket: SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Data Personil di Kejaksaan Negeri Blitar

Jabatan	Perempuan	Laki-laki
Kajari	0	1
Jaksa Fungsional	4	2
Kasie	0	4
Kasubsi	0	1
Kaur	1	3
Bendahara	1	1
Staf	3	6
Jumlah	9	18

Sumber: <http://kejari-blitar.go.id/index.html>, 2016

Data Personil Kepolisian Resort Kota Blitar

Jabatan	Pangkat	Jumlah	
		L	P
Kapolresta	AKBP	1	0
Wakapolresta	KOMPOL	1	0
Kabag min	KOMPOL	1	0
Kabag OPS	KOMPOL	1	0
Kabag Binamitra	KOMPOL	1	0
Kasat Intelkam	DKP	1	0
Kasat Reskrim	DKP	1	0
Kasat Samapta	DKP	1	0
Kasat Lantas	DKP	1	0
KBO Intelkam	IPBA	1	0
KBO Reskrim	IPTU	1	0
Jabatan	Pangkat	Jumlah	
		L	P
Kapolsel Kepanjenkidul	AKP	1	0

Kapolsek Sananwetan	AKP	1	0
Kapolsek Sukorejo	AKP	1	0
Kanit Patroli Samapta	AIPTU	1	0
Kanit Patroli Lantas	IPDA	1	0
Kanit Resident	IPDA	0	1
Kanit Laka	IPDA	1	0
Kaur Men OPS	IPTU	1	0
Kanit Intelkam	IPDA	1	0
Kanit Idik	AIPTU	1	0
Kasubag Pers	IPDA	1	0
Kasubag REN	AIPTU	1	0
Kaur Dokkes	PNS GOL III A	0	1
Waka Polsek Sananwetan	AIPTU	1	0
Waka Polsek Kepanjenkidul	AIPTU	1	0
Waka Polsek Sukorejo	AIPTU	1	0
Kanit PPAD	AIPDA	1	0
Jumlah		26	2

Sumber: Polres Kota Blitar, Tahun 2008

Data PNS Kota Blitar Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Ruang	Jenis Kelamin				Jumlah
		P	%	L	%	
I	a	-	-	-	-	-
I	b	2	0.05	1	0.03	3
I	c	2	0.05	20	0.51	22
I	d	4	0.10	50	1.28	54
II	a	6	0.15	39	1.00	45
II	b	70	1.79	80	2.05	150
II	c	113	2.89	203	5.19	316
II	d	91	2.33	207	5.30	298
III	a	252	6.45	49	1.25	301
III	b	363	9.29	131	3.35	494
III	c	288	7.37	241	6.17	529
III	d	190	4.86	197	5.04	387
IV	a	442	11.31	171	4.38	613
IV	b	215	5.50	301	7.70	516
IV	c	15	0.38	136	3.48	151
IV	d	1	0.03	26	0.67	27
IV	e	1	0.03	1	0.03	2
Jumlah		2,055	53	1,853	47.42	3,908

Sumber: BKD Kota Blitar, 2015

Data Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-laki	
II A	0	1	1
II B	4	19	23
III A	12	30	42
III B	20	49	69
IV A	114	150	264
IV B	60	67	127
V A	6	9	15
V B	1	0	1
Jumlah	217	324	541

Sumber: BKD Kota Blitar, 2015

Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional di Kota Blitar

No	Nama	L	P	Jumlah
1	Apoteker	1	7	8
2	Asisten Apoteker	7	17	24
3	Auditor	2	3	5
4	Dokter	18	18	36
5	Dokter Gigi	1	9	10
6	Fisioterapis	4	2	6
7	Guru	598	1065	1663
8	Non Jabatan	5	5	10
9	Nutrisisionis	2	15	17
10	Pengawas Bibit Ternak	1	1	2
No	Nama	L	P	Jumlah
11	Pengawas Pemerintahan	3	4	7
12	Pengawas Perikanan	2	1	3
13	Pengawas Sekolah SLTP, SLTA, SLB	10	3	13
14	Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB	6	4	10
15	Penilik	1	1	2
16	Penyuluh KB	7	7	14
17	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	2	3
18	Penyuluh Perikanan	1	1	2
19	Penyuluh Pertanian	6	2	8
20	Perawat	81	155	236
21	Pranata Laboratorium Kesehatan	7	19	26
22	Radiografer	4	3	7
23	Sanitarian	6	6	12
24	Teknisi Elektromedis	3	1	4
25	Teknisi Gigi	1	3	4
26	Arsiparis	1	0	1
27	Asisten Penyuluh Pertanian	1	0	1
28	Bidan	0	51	51
29	Medik Veteriner	1	0	1
30	Pengawas Ketenagakerjaan	0	1	1
31	Penguji Kendaraan Bermotor	2	0	2
32	Perawat Gigi	0	6	6
33	Perekam Medis	0	4	4
34	Pustakawan	1	0	1
35	Refraksisionis Optisien	0	2	2
36	Terapis Wicara	2	0	2
TOTAL		786	1418	2204

Sumber: BKD Kota Blitar, 2015

c. Pekerja di sektor informal

Lapangan kerja informal adalah lapangan kerja yang keberadaannya atas usaha sendiri dan upah tidak terjangkau oleh peraturan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya usaha mandiri, pedagang, peternak, petani, nelayan, tukang kayu / bangunan, tukang jahit, jasa profesi mandiri, dan sebagainya. Setiap tenaga kerja dapat memasuki lapangan kerja informal karena jenis pekerjaan ini tidak menuntut persyaratan khusus atau spesifik. Modal utama untuk bekerja dalam lapangan kerja informal adalah : Tekad, Kemauan dan kesungguhan .

Data Perusahaan dan Tenaga Kerja WNI menurut sektor

No	Sektor	Perusahaan	Tenaga Kerja WNI
1	Pertanian/Kehutanan/Peternakan	2	32
2	Pertambangan	-	-
3	Perindustrian	58	4.259
4	Listrik	3	219
5	Bangunan	1	38
6	Perdagangan	172	4.171
7	Angkutan	6	334
8	Keuangan	47	1.317
9	Jasa-jasa	61	1.609
	Kota Blitar 2014	350	11.979
	2013	350	10.685
	2012	369	8.902
	2011	323	8.168
	2010	298	7.905

Sumber: Blitar Dalam Angka 2015

3.3.2. Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai andil dalam menggerakkan perekonomian di Kota Blitar. Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi yang dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya. Pada tahun 2014 di tingkatan primer terdapat 311 koperasi dan di tingkatan pusat terdapat 3 koperasi.

Berdasarkan bidang usaha yang digeluti, terdapat 1 koperasi di bidang pertanian, 3 koperasi bidang industri kerajinan, 50 koperasi bidang konsumsi perdagangan, 137 koperasi bidang jasa dan sejenisnya, serta 123 koperasi serba usaha.

Keanggotaan Koperasi dan Pekerja Industri Kerajinan

Kategori	Sukorejo		Kepanjenkidul		Sanan Wetan		Kota Blitar	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Primer	2.213	3.643	2.504	4.064	3.203	4.200	7.920	11.907
Ind. Kerajinan	0	0	17	60	0	0	17	60
Jumlah	2.213	3.643	2.521	4.124	3.203	4.200	7.937	11.967

Sumber: Dinas Koperasi Kota Blitar, Tahun 2008

Anggota dan Pengurus Koperasi di Kota Blitar

Kategori	Sukorejo		Kepanjenkidul		Sanan Wetan		Kota Blitar	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Anggota	2.213	3.643	2.487	3.560	4.013	4.200	8.713	11.403
Pengurus	89	97	124	146	156	188	369	431
Manajer	2	3	3	5	2	7	7	15
Pekerja	62	120	51	68	56	190	169	378
Jumlah	2.366	3.863	2665	3.779	4.227	4.585	9.258	12.227

Sumber: Dinas Koperasi Kota Blitar, tahun 2008

3.3.3. Perdagangan dan industri

Usaha perdagangan di Kota Blitar termasuk pada kategori perdagangan menengah, kecil dan mikro. Usaha perdagangan besar sangat kecil bahkan pada tahun-tahun ini tidak ada.

Pedagang dan Perdagangan di Kota Blitar

Jenis Usaha	Perempuan	Laki-Laki	Total
Pedagang			
Pengusaha Kecil			
Jumlah 2015	107	297	404
2014	63	188	251
2013	75	174	249
2012	104	221	325
2011	115	212	327
Pengusaha Menengah			
Jumlah 2015	11	48	59
2014	3	23	26
2013	6	29	35
2012	7	36	43
2011	13	41	44
Industri Kecil	360	1415	2375
Pengusaha Menengah	-	-	-
Jumlah 2015			
2014	910	1418	2328
2013	880	1230	2110
2012	860	1242	2102
2011	830	1181	2011

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016

3.3.5. Pertanian

Sepanjang tahun 2014 jumlah lahan sawah di Kota Blitar kembali mengalami penyusutan sehingga luasnya menjadi 1.104 hektar. Keseluruhan lahan sawah tersebut ditanami padi dengan frekuensi tanam satu atau dua kali setahun. Sawah yang ditanami padi dua kali setahun seluas 444 hektar, sedangkan yang hanya tanam satu kali setahun seluas 660 hektar. Keterbatasan lahan dan pemukiman yang semakin padat menjadikan potensi peternakan di Kota Blitar tidak terlalu besar. Namun demikian

masyarakat yang mengusahakan peternakan dari tahun ke tahun masih tetap eksis terutama masyarakat di wilayah pinggiran kota.

Data Penyuluhan Pertanian dan Peternakan di Kota Blitar

Kategori Penyuluhan	Sukorejo		Kepanjenkidu		Sanan Wetan		Kota Blitar	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Pertanian	0	1	0	2	1	2	1	5
Peternakan	0	1	1	0	0	0	1	1
Mantri Tani	0	1	0	1	0	1	0	3
Mantri Ternak	1	0	1	0	0	1	2	1
Jumlah	1	3	2	3	1	4	4	10

Sumber: Dinas Pertanian Kota Blitar, Tahun 2008

3.3.5. Perhubungan

Dalam hal menyangkut perhubungan di Kota Blitar, sampai dengan Tahun 2014 tersedia sarana angkutan darat saja yaitu kereta api dan bus. Belum ada pembedaan angkutan, namun di Kota Blitar sudah tersedia angkutan sekolah gratis yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan sarana jalan di Kota Blitar sepanjang 148.681 km dengan pembagian yaitu jalan kota 235.171 km, jalan provinsi 5.510 km dan jalan nasional 8.000 km.

3.3.6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi informatika berkembang pesat di Kota Blitar. Didukung dengan program Ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Walikota Blitar Tahun 2015, berimplikasi pada bergeraknya segala usaha di Kota Blitar menjadi lebih berinovasi yaitu media promosi melalui internet. Bukan dalam hal usaha saja, namun pembayaran dan lainnya dapat melalui system on line.

Data wartawan di Kota Blitar

No	Klasifikasi	L	P	Jumlah
1	Wartawan media mingguan	47	5	52
2	Wartawan media harian	10	0	10
3	Wartawan Radio	2	4	6
4	Wartawan TV	15	0	15
5	Wartawan Media On Line	2	2	4
	Jumlah			83

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, 2015

3.4. Politik, Sosial & Hukum

3.4.1. Politik

Dalam hal partisipasi politik, berdasarkan data dari proses pemilu di Kota Blitar dapat dilihat sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih di Kota Blitar Tahun 2014

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih		Jumlah (DPT)	Ket
			Laki-Laki	Perempuan		
Kecamatan Sukorejo						
1.	Blitar	9	1.589	1.711	3.300	
2.	Turi	6	1.153	1.228	2.381	
3.	Tlumpu	7	1.324	1.347	2.671	
4.	Karangsari	12	1.905	1.928	3.833	
5.	Pakunden	21	3.743	3.710	7.453	
6.	Sukorejo	32	5.377	5.539	10.916	
7.	Tanjungsari	17	2.967	3.039	6.006	
	Jumlah	104	18.058	18.502	36.560	
Kecamatan Kepanjenkidul						
1.	Bendo	12	1.981	2.000	3.981	
2.	Kauman	14	2.193	2.306	4.499	
3.	Kepanjenlor	15	2.372	2.253	4.625	
4.	Ngadirejo	8	1.252	1.325	2.577	
5.	Kepanjenkidul	18	2.871	3.191	6.062	
6.	Sentul	18	2.768	2.947	5.715	
No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Daftar Pemilih	Jumlah (DPT)		Ket
				Laki-Laki	Perempuan	
7.	Tangggung	11	1.943	1.943	3.886	
	Jumlah	96	15.380	15.965	31.345	
Kecamatan Sananwetan						
1.	Rembang	7	1.146	1.252	2.398	
2.	Klampok	9	1.588	1.638	3.226	
3.	Plosokerep	8	1.596	1.669	3.265	
4.	Karangtengah	15	2.329	2.615	4.944	
5.	Sananwetan	30	4.822	5.284	10.106	
6.	Bendogerit	20	3.756	3.994	7.750	
7.	Gedog	22	3.868	4.091	7.959	
	Jumlah	111	19.105	20.543	39.648	
	Total		52.543	55.010	107.553	

Sumber: Sekretariat DPRD kota Blitar, 2014

Jumlah Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Blitar

No	Nama Organisasi/Partai	Jumlah Pengurus		Jumlah
		L	P	
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	61	23	84
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17	1	18
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	1	6
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	1	13
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	38	19	57
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	11	6	17
7	Partai Demokrat	61	25	86
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	57	8	65
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	15	1	16
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	8	2	10
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	13	2	15
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	3	6

Sumber: Bakesbang pol dan PBD Kota Blitar, 2015

Pejabat Legislatif Sesuai Jenis Kelamin

NO	Partai Politik	Jumlah Anggota Parlemen 2014				Jumlah Kursi	Jumlah Anggota Parlemen 2009				Jumlah Kursi
		Lk	%	Pr	%		Lk	%	Pr	%	
1	PDI Perjuangan	9	90	1	10	10	6	100	0	0	6
2	Partai Demokrat	2	100	0	0	2	4	67	2	33	6
3	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	3	100	0	0	3	3	100	0	0	3
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	100	0	0	1	0	0	1	10	1
5	Partai Gerindra	3	100	0	0	3	-	-	-	-	-
6	Partai Golkar	1	100	0	0	1	3	100	0	0	3
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	67	1	33	3	2	67	1	33	3
8	Partai Nasional Demokrat	1	100	0	0	1	-	-	-	-	-
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	100	0	0	1	2	100	0	0	2
10	PKNU					1	100	0	0	0	1
	Jumlah	23	88	2	12	25	21	84	4	16	25
	Jumlah Fraksi DPD					4	Fraksi				6
	Jumlah Parpol Daerah					9	Partai				7
	Jumlah Parpol Peserta Pemilu					20	Partai				38

Sumber: data SIPD Kota Blitar, 2015

3.4.2. Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang berperan dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Untuk melihat perkembangan sektor pendidikan di daerah maka dapat kita lihat dari aspek, seperti : Buta Aksara; Angka Partisipasi Kasar; Angka Partisipasi Murni; angka putus sekolah maupun rasio murid dan guru dan rasio murid sekolah.

• Angka Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional/KF)

Salah satu ukuran dasar untuk melihat keberhasilan pendidikan adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk usia 10 tahun ke atas.

• Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi

sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen.

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Tabel APS, APK, dan APM Tahun 2014

Tingkatan Sekolah	APS			APK			APM		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD/MI/Paket A			12.28 3	358,43	364,71	723,14	331,87	336,8	668,67
SMP/MTs/Paket B			6.257	427,59	460,69	888,28	339,59	356,02	695,61
SMA/K/MA/Paket C			14.38 2	690,65	768,91	1.459,5 6	542,3	614,91	1.157,2 1

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2014

• **Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah menurut kelas dan jenjang sekolah, tampak mulai terjadi sejak SD, dan menunjukkan persentase yang meningkat seiring dengan jenjang sekolah. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan bagi anak untuk bertahan belajar di sekolah sejak memasuki sekolah dasar. Untuk menunjang program wajib belajar sembilan Tahun, kenyataan ini harus mendapatkan perhatian.

Kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi siswa sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya, dan anggapan lebih baik bekerja dengan mendapatkan uang, disamping anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin

besar biaya yang diperlukan, sementara masyarakat miskin dan rumah tangga miskin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya pendidikan.

Tabel Jumlah sekolah, Guru dan Murid di Kota Blitar

No	Jenis Sekolah	Jumlah sekolah	Guru	Murid
1	TK/Kindergarten	79	330	4.767
2	SD/Primary School	63	815	15.561
3	SMP/Junior Secondary School	20	590	9.040
4	SMA/SMK/Senior Secondary School	24	1.123	15.080
5	PLB/Extraordinary School	6	42	262

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2014

Data Jumlah Taman Kanak-kanak menurut kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Sukorejo	24	89	1.435
2	Kepanjenkidul	22	105	1.419
3	Sananwetan	33	136	1.913

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2015

Data Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa

No	Perguruan Tinggi	Dosen			Mahasiswa		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Univ Negeri Malang	2	7	9	92	447	539
2	STKIP PGRI Blitar	15	19	34	176	479	655
3	STIEKEN	11	8	19	158	467	625
4	AMPINDO	8	6	14	89	71	160
5	UNISBA	73	40	113	2.407	1.373	3.780
6	Poltekkes Malang	9	6	15	78	226	304
7	Universitas Patria Wacana	15	10	25	34	5	39
8	STIKes Patria Husada Blitar	9	20	29	77	180	257
	Kota Blitar 2014	148	116	258	3.111	3.248	6.359
	2013	140	117	257	4.216	4.345	8.561
	2012	148	131	279	4.447	4.055	8.502
	2011	158	147	305	1.947	3.014	4.961
	2010	166	119	285	2.771	2.253	5.024

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2015

b. Kesehatan

Permasalahan atau isu strategis gender dalam bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Kesehatan Reproduksi, Partisipasi dalam ber KB, Penolong Persalinan, cakupan imunisasi, status gizi balita, HIV/AIDs dan penyakit menular lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah sarana prasarana kesehatan yang ada.

Sarana kesehatan di Kota Blitar tergolong cukup memadai dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	RS Umum	RS Bersalin	Puskes mas	Puskes mas Pemban tu	Klinik KB	Posyan du
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukorejo	1	1	1	5	0	52
2	Kepanjenkidul	3	1	1	6	0	50
3	Sananwetan	1	0	1	6	0	61
	Kota Blitar	5	2	3	17	0	163
2013		5	2	3	17	0	163
2012		5	2	3	16	0	163
2011		5	2	3	17	0	162
2010		5	2	3	17	0	159
2009		5	2	3	17	4	158

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2014

Angka Kematian Ibu (AKI)

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian.

Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung. Secara umum kejadian kematian pada manusia berhubungan erat dengan permasalahan kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi berbagai faktor yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengakibatkan kematian dalam masyarakat.

Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini

adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Salah satu angka kematian yang dibahas pada penyelenggaraan data gender adalah angka kematian ibu melahirkan.

AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan. Harapan kita agar bidan di kelurahan benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKI (MMR).

Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di rumah sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survey Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survey-survey sebelumnya.

Berbagai upaya telah diupayakan guna menurunkan angka kematian ibu bersalin ini baik fasilitasi dari segi manajemen program KIA maupun sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan klinis keterampilan petugas di lapangan serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KIA. Kasus kematian ibu pada tahun 2015 disebabkan karena preeklamsi sebanyak satu kasus.

Data kasus kematian Ibu Melahirkan di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Data Kematian Ibu Melahirkan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Jml Ibu Meninggal	Jml Ibu Melahirka	AKI
----	-----------	-------------------	-------------------	-----

			n	
1	2			
1	Sananwetan	1	792	
2	Kepanjenkidul	0	623	
3	Sukorejo	0	652	
	Kota Blitar		2.067	48,80
	2015			
	2014	3	2.165	139,27
	2013	1	2.035	49,48
	2012	7	2.078	339,31
	2011	2	1.979	101,8

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Penurunan angka kematian bayi merupakan indikasi terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu wujud keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Data Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran				Juml ah	Jumlah Kematian				Jum lah
		Lk	%	Pr	%		Lk	%	Pr	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sukorejo	324	50	325	50	652	5	83	1	17	6
2	Kepanjenkidul	319	51	304	49	623	8	100	0	0	8
3	Sananwetan	425	54	367	46	792	2	50	2	50	4
	2015					2.067					18
	2014					2.165					11
	2013					2.035					14
	2012					2.078					15
	2011					1.979					14

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Proporsi Penyebab Kematian Bayi Tahun 2015

No.	Penyebab Kematian	kasus	%
1.	BBLR	4	24
2.	Asfiksi	6	35
3.	Meningitis/ensefalitis	-	-
4.	Kelainan saluran pencernaan	-	-
5.	Kelainan jantung kogenital &	-	-

	Hydrocephalus			
6.	sepsis	2	12	
7.	Tetanus	-	-	
8.	Malnutrisi	-	-	
9.	Pneumonia	1	6	
10.	Kelainan Kogenital	4	24	
		17	100	

Angka Kematian Balita (AKABA).

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan penduduk, sehingga kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Data Kematian Balita di Kota Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Balita				Jumlah	Jumlah Kematian				Jumlah
		Lk	%	Pr	%		Lk	%	Pr	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sukorejo	1,835	53	1,650	47	3,485	7	0.20	6	0.17	13
2	Kepanjenkidul	1,370	51	1,304	49	2,674	2	0.07	1	0.04	3
3	Sananwetan	1,655	53	1,455	47	3,110	-	-	3	0.10	3
	2015	4,860	52	4,418	48	9,278	9	0.10	10	0.11	19
	2014	5,950	52	5,417	48	11,367	10	0.09	3	0.08	13
	2013	4,870	53	4,359	47	9,229	18	0.20	8	0.09	26
	2012	6,064	55	5,033	45	11,097	15	0.14	11	0.10	26
	2011	6,195	58	4,409	42	10,604	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Data Kematian Balita di Kota Blitar Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sukorejo	-	-	-	-	2	3	-	3	2	3	-	3
2	Kepanjenkidul	2	2	-	2	1	1	-	1	3	3	-	3
3	Sananwetan	6	6	1	7	3	5	1	6	9	11	2	13
JUMLAH (KAB/KOTA)		8	8	1	9	6	9	1	10	14	17	2	19
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		7.58	7.58	0.95	8.52	6.04	9.06	1.01	10.07	6.83	8.30	0.98	9.27

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Perlu upaya-upaya yang jelas dan terarah untuk menurunkan AKB utamanya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan juga melalui meningkatkan cakupan, keterjangkauan pelayanan kesehatan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2015

Proporsi Penyebab Kematian Balita di Kota Blitar Tahun

No.	Penyebab Kematian	kasus	%
1.	Diare	2	11
2.	Pnemonia	1	5
3.	Meningitis/ ensefalitis	-	-
4.	Kelainan Saluran Pencernaan	-	-
5.	Kelainan Kogenital	4	21
6.	Sepsis	2	11
7.	Astfksi	6	32
8.	BBLR	4	21
9.	TB	-	-
10.	Campak	-	-
		19	100

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Kesehatan Reproduksi

Persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan semakin memperbesar resiko persalinan. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut. Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (di atas 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara jumlah kelahiran yang terbatas (cukup dua saja) membuat perhatian ibu terhadap anak-anaknya semakin besar.

Disamping itu juga pengetahuan para ibu rumah tangga tentang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tersebut telah tersedia di berbagai tempat-tempat pemukiman penduduk, misalnya melalui Puskesmas, Posyandu, Polindes dan sarana-sarana kesehatan lainnya. Dengan demikian diharapkan akan lahir generasi baru yang lebih handal dan berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja

No.	Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2014				
	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	KIE	1.871	2.181	4.052
		Pelayanan	8.607	9.553	18.160

	(PKPR)	Medis			
		Konseling	35	142	177
2.	2015				
	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	KIE	1.596	1.884	3.480
		Pelayanan Medis	6.247	6.503	12.750
		Konseling	303	562	865

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2015

DATA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KOTA BLITAR

No	Kasus	Tahun	
		2015	2016
1	Remaja Hamil	30	5
2	IMS	15	5
3	ISR	7	-
4	Seks Pra Nikah	2	2
5	NAPZA	1	-

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Partisipasi dalam ber KB.

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Data peserta KB aktif di Kota Blitar

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif		
		L	P	Jumlah
2012	22.225	1.343	15.623	16.966
2013	23.238	1.196	16.040	17.236
2014	24.093	1.080	16.652	17.732
2015	24.058	971	16.676	17.647

Sumber: Bapemas & KB Kota Blitar, 2015

Imunisasi

Sebenarnya jenis imunisasi cukup beragam baik yang diberikan pada anak-anak maupun pada orang dewasa, tetapi yang jadi focus bahasan disini adalah imunisasi untuk anak balita (bawah 5 Tahun).

Jumlah Balita Kota Blitar

No	Kecamatan	Jml Posyandu	Jumlah

1.	Kepanjenkidul	60	4472
2.	Sanawetan	51	3035
3.	Sukorejo	53	3860

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

NO	KECAMATA N	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)										BAYI DIIMUNISASI										IMUNISASI DASAR LENGKAP						
		DPT-HB3/DPT-HB-HB3					POLIO 4*					CAMPAK					IMUNISASI DASAR LENGKAP											
		L	P	L+P	JML	%	JML	%	JML	%	JML	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	%	JML	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sukorejo	372	363	735	354	95,16	325	89,53	679	92,38	356	95,70	296	81,54	652	88,71	356	95,70	296	81,54	652	88,71	353	94,89	293	80,72	646	39
2	Kepanjen kidul	327	320	647	269	82,26	283	88,44	552	85,32	268	81,96	232	72,50	500	77,28	265	81,04	232	72,50	497	76,82	255	77,98	211	65,94	455	32
3	Sananwetan	415	406	821	398	95,90	350	86,21	748	91,11	398	95,90	333	82,02	731	89,04	392	94,46	333	82,02	725	86,31	387	93,25	339	83,50	726	43
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,114	1,089	2,203	1,021	91,65	938	87,97	1,979	89,83	1,022	91,74	861	79,063	1,883	85,47	1,013	90,93	861	79,06	1,874	85,07	995	89,32	843	77,41	1,838	43

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

Status Gizi

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusu sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui.

Berikut ini akan disajikan gambaran mengenai indikator-indikator status gizi masyarakat di Sulawesi Selatan antara lain bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan status gizi balita, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena *Intra Uterine Growth Retardation* (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang, banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT JENIS KELAMIN,
KECAMATAN, 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH BAYI		JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF						Jumlah Konselor			
				USIA 0-6 BULAN									
		L	P	L+P	JML	%	JML	%	JML	%	L	P	T
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2014												
1	Sananwetan	444	480	924	262		272		534		1	9	10
2	Kepanjenkidul	309	295	604	108		100		208		1	9	10
3	Sukorejo	427	370	797	321		298		619		-	10	10
Jumlah		1.180	1.145	2.325	691		670		1.361		2	28	30
	2015												
1	Sukorejo	401	351	752	326	81.30	273	77.78	599	79.65	1	9	10
2	Kepanjenkidul	198	170	368	156	78.79	138	81.18	294	79.89	1	9	10
3	Sananwetan	407	412	819	306	75.18	308	74.76	614	74.97	-	10	10
Jumlah		1.006	933	1.939	788	78.33	719	77.06	1.507	77.72	2	28	30

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih

No	Kecamatan	Gizi Kurang			Gizi Buruk			Stunting			Gizi Lebih		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
	2014												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sananwetan	51	48	99	4	0	4	0	0	173	21	20	41
2	Kepanjenkidul	20	17	37	1	0	1	0	0	55	16	16	32
3	Sukorejo	53	56	109	3	0	3	0	0	230	38	27	65
	Jumlah	124	121	245	8	0	8	0	0	458	75	63	138
	2015												
1	Sananwetan				2	1	3						
2	Kepanjenkidul				0	0	0						
3	Sukorejo				5	1	6						
	Jumlah				7	2	9						

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Percentase Balita Menurut Penolong Kelahiran dan Status BBLR Tahun 2015 di Kota Blitar

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHIR HIDUP						BAYI BARU LAHIR DITIMBANG				BBLR				
		L	P	L + P	JML	%	JM L	%	JM L	%	JML	%	JM L	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Sukorejo	322	324	646	322	100	324	100	646	100	20	6.21	18	5.56	38	5.88
2	Kepanjenkidul	311	304	615	311	100	304	100	615	100	15	4.82	12	3.95	27	4.39
3	Sananwetan	423	365	788	423	100	365	100	788	100	22	5.20	22	6.03	44	5.58
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1,056	993	2,049	1,056	100	993	100	2,049	100	57	5.40	52	5.24	109	5.32

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi pada balita adalah dengan anthropometri yang diukur melalui indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Kategori yang digunakan adalah: **gizi lebih** (z-score>+2 SD); **gizi baik** (z-score-2 SD sampai +2 SD); **gizi kurang** (z-score<-2 SD sampai -3 SD) dan **gizi buruk** (z-score<-3 SD).

Data Balita ditimbang, Berat Badan Bawah Garis Merah dan Gizi Buruk di Kota Blitar 2015

NO	KECAMATAN	BALITA												KASUS BALITA					
		JUMLAH BALITA DILAPORKAN (S)			DITIMBANG			% (D/S)			Berat Badan Bawah Garis Merah (BGM)			GIZI BURUK					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	4	5	6
1	Sukorejo	1,911	1,770	3,681	1,328	1,238	2,566	69.49	69.94	69.71	8	0.60	5	0.40	13	0.51	5	1	
2	Kepanjenkidul	1,681	1,557	3,238	1,097	1,090	2,187	65.26	70.01	67.54	3	0.27	3	0.28	6	0.27	-	-	
3	Sananwetan	2,136	1,978	4,114	1,775	1,688	3,463	83.10	85.34	84.18	10	0.56	6	0.36	16	0.46	2	1	
JUMLAH (KAB/KOTA)		5,728	5,305	11,033	4,200	4,016	8,216	73.32	75.70	74.47	21	0.50	14	0.35	35	0.43	7	2	

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

HIV/AIDS

Penyakit HIV/AIDS yang merupakan new emerging diseases, dan merupakan pandemi pada semua kawasan, penyakit ini telah sejak lama menyita perhatian berbagai kalangan, tidak hanya terkait dengan domain kesehatan saja. Kasus penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini, di Indonesia senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan Pengendalian HIV/AIDS adalah: zero infection, zero death related HIV/AIDS, dan zero stigma and discrimination. Langkah kongkrit Pemerintah Kota Blitar dalam usaha mewujudkan kebijakan pengendalian antara lain:

1. Pengadaan sarana pendukung yaitu Pengadaan klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing) di Puskesmas Kepanjenkidul, Layanan PITC (Provider Initiated Testing and Counselling) di Puskesmas Sukorejo dan Puskesmas Sananwetan.

Tenaga Kesehatan terlatih penanganan HIV/AIDS di Kota Blitar:

No	Lokasi	Tenaga/Fasilitas	Jumlah
1	Puskesmas	Dokter	2
		Konselor HIV/AIDS	4
		Laboratorium	1
2	RSUD Kota Blitar	Dokter	2
		Konselor HIV/AIDS	2
		Perawat	1
		Farmasi	1
		Laboratorium	1

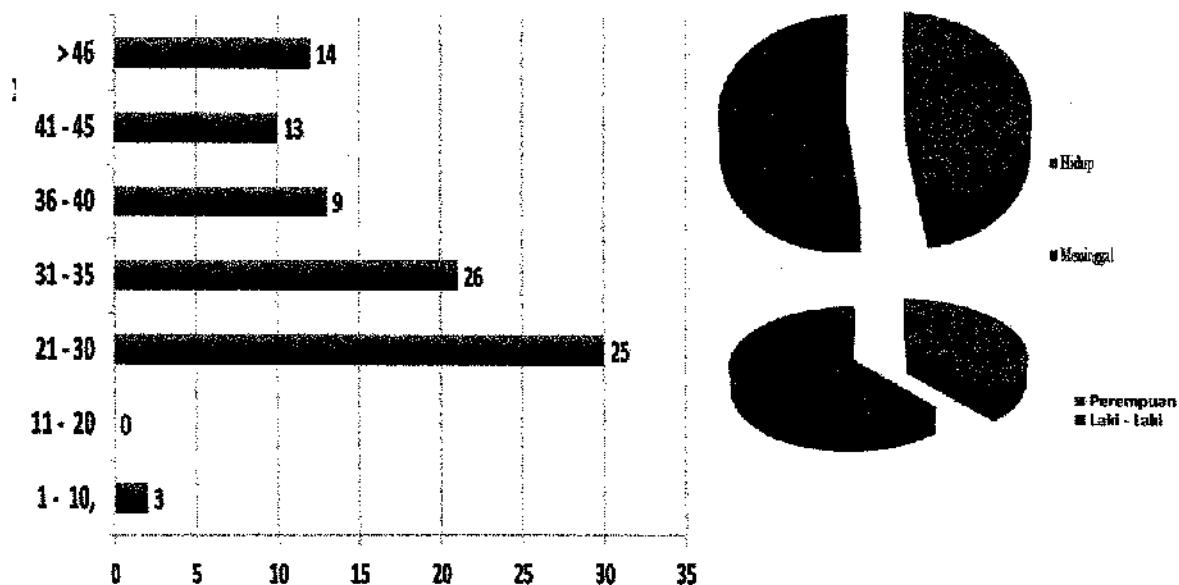
Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

2. Kegiatan agenda rutin yaitu :

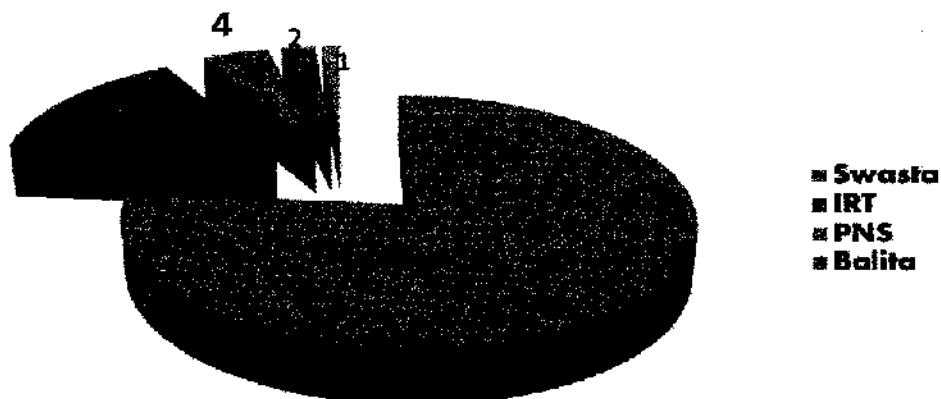
- ✓ Pertemuan Pemberdayaan Dukungan Sebaya HIV/AIDS
- ✓ Pertemuan monev HIV/AIDS bagi UPK
- ✓ KIE Pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun
- ✓ Pelatihan layanan LKB
- ✓ Rapat kerja Pokja KPA Kota Blitar
- ✓ Penguatan Jejaring Populasi Kunci
- ✓ Pelatihan Pemulasaraan Jenazah sesuai standar

- ✓ Pelatihan IMS bagi petugas kesehatan
- ✓ Penguatan program PMTCT
- ✓ Hari AIDS sedunia

Data Kasus HIV & AIDS di Kota Blitar s/d 2016



Data Kasus HIV & AIDS di Kota Blitar Berdasarkan Riwayat Pekerjaan s/d 2016



Penyakit Menular

Penyakit menular yang juga dikenal sebagai penyakit infeksi dalam istilah medis adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteria atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar dan trauma benturan) atau kimia (seperti keracunan) yang mana bisa ditularkan atau menular kepada orang lain melalui media tertentu seperti udara (TBC, Infulenza dll), tempat makan dan minum yang kurang bersih pencuciannya (Hepatitis, Typhoid/Types dll), jarum suntik dan transfusi darah (HIV Aids,

Hepatitis dll). Kasus penyakit menular yang ada di Kota Blitar antara lain DBD, Difteri, Typus, Tuberkolosis/TB, HOV/AIDS.

Penyakit Menular Berbasis Puskesmas Sentinel

Survei sentinel adalah suatu system yang dapat memperkirakan insiden penyakit pada suatu wilayah yang tidak memiliki system surveilans baik berbasis populasi tanpa melakukan survey dengan biaya yang mahal.

Surveilans Terpadu Penyakit (STP) Menular Berbasis Puskesmas Di Kota Blitar

No	Jenis Penyakit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kolera	1	0	1
2	Diare	1.308	1.415	2.723
3	Diare Berdarah	61	82	143
4	Tifus Perut Klinis	502	634	1.136
5	TBC Paru BTA (+)	233	196	429
6	Tersangka TBC Paru	73	86	159
7	Kusta PB	-	-	-
8	Kusta MB	-	-	-
9	Campak	39	52	91
10	Difteri	6	0	6
11	Batuk Rejan	-	-	-
12	Tetanus	-	-	-
13	Hepatitis klinis	10	2	12
14	Malaria Klinis	-	-	-
15	Malaria Vivax	-	-	-
16	Demam Berdarah Dengue	32	23	55
17	Demam Dengue	56	46	102
18	Pneumonia	72	64	136
19	Sifilis	5	3	8
20	Gonorrhoe	13	9	22
21	Frambusia	-	-	-
22	Filariasis	-	-	-
23	Influenza	9.316	11.982	21.292

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Sepuluh Besar Penyakit (STP) Rumah Sakit Rawat Jalan Di Kota Blitar

No	Penyakit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Diare	491	416	907
2	Influenza	549	354	961
3	TB Paru Klinis	24	16	40
4	Pneumonia	73	59	132
5	Typus Perut Klinis	7	7	14
6	Demam berdarah dengue	60	46	106
7	TB Paru BTA (+)	15	24	39
8	Typus Perut Widal (+)	287	293	580
9	Malaria Klinis	0	0	0
10	Hepatitis Klinis	19	11	30

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2015

Data jumlah Donor Darah menurut jenis kelamin

Tahun	Laki-laki	Perepuan	Jumlah
2014	5459	2694	8153
2013	2593	2983	5576
2012	2411	2676	5087
2011	2400	1653	4053
2010	3078	1073	4151

Sumber: PMI Kota Blitar 2014

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Penyandang Cacat Menurut Jenis dan Kecamatan

Kecamatan/ Tahun	Tuna Netra	Cacat Tubuh	Bisu Tuli	Cacat Mental	Jumlah
Sukorejo	33	65	18	74	190
Kepanjenkidul	11	40	12	76	139
Sananwetan	22	61	27	76	186
Kota Blitar 2014	66	166	57	226	515
2013	97	232	72	296	697
2012	97	232	72	296	697
2011	99	249	116	296	760
2010	57	128	37	202	424

Sumber: Blitar Dalam Angka, 2015

Penyandang Masalah Sosial Menurut Kecamatan

Kecamatan/ Tahun	Disabilitas	Ex Psychiatric	Ex Kusta	Tuna Graha	Jumlah
Sukorejo	159	19	14	5	197
Kepanjenkidul	136	52	2	1	191
Sananwetan	157	5	4	7	173
Kota Blitar 2014	452	76	20	13	561
2013	701	76	20	26	747
2012	701	-	20	26	747
2011	763	-	-	10	773
2010	424	-	-	10	434

Sumber: Blitar Dalam Angka, 2015

Masalah Sosial Anak Menurut Jenis dan Kecamatan

Kecamatan/ Tahun	Anak Terlantar	Balita Terlantar	Anak Nakal	Anak Jalanan	Jumlah
Sukorejo	12	3	11	18	44
Kepanjenkidul	10	2	1	3	16

Sananwetan	16	7	-	2	25
Kota Blitar 2014	38	12	12	23	85
2013	236	25	12	24	297
2012	236	25	12	24	297
2011	221	30	12	25	288
2010	221	30	12	25	288

Sumber: Blitar Dalam Angka, 2015

Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar

No	Jenis Organisasi	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Organisasi Masyarakat	21	23	32
2	Organisasi Kesamaan Secara Umum	28	30	26
3	Organisasi Keagamaan	10	10	10
4	Organisasi Wanita	6	6	6
5	Aliran Kepercayaan	4	4	3
6	Organisasi Beladiri	2	2	2
7	Organisasi Profesi	8	9	10
8	Lembaga Swadaya Masyarakat	19	17	37
9	Yayasan	37	38	42
	Jumlah	132	139	170

Sumber: Blitar Dalam Angka, 2015

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sesuai Indikator PMKS

No	Jenis PMKS	2014	2015	Jumlah Penerima Bantuan
1	Anak Balita Terlantar	12	25	1
2	Anak Terlantar	38	237	7
3	Anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	3	2	2
4	anak jalanan	5	7	2
5	anak dengan kedisabilitasan	83	67	
6	wanita rawan sosial ekonomi		820	88
7	wanita yang menjadi korban tindak kekerasan/ yang diperlakukan salah			
8	lanjut usia terlantar	77	598	254
9	lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah			
10	penyandang disabilitas	442	453	19
11	penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis			
12	tuna susila	2	10	1
13	Pengemis	65	4	1
14	Gelandangan	13	4	3
15	gelandangan psikotik			
16	bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	170	119	0
17	korban penyalah gunaan NAPZA	12	6	2
18	keluarga fakir miskin	-	28.12	26.361
			5	

19	keluarga berumah tak layak huni	-	-	-
20	keluarga bermasalah sosial psikologis	-	205	0
21	masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	0	0	0
22	korban bencana alam	-	4	-
23	korban bencana sosial/ pengungsi	-	1	-
24	pekerja migran terlantar	-	-	-
25	pengidap HIV/ AIDS	5	-	-
26	keluarga rentan	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2015

a. Karang taruna

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan yang berada pada level desa, yang anggotanya berusia 12 – 25 tahun yang berfungsi untuk menghimpun dan menggerakkan pemuda-pemuda yang berada di kelurahan maupun kecamatan dalam rangka melatih dalam mengorganisir kelompok dan mengasah kepemimpinan pemuda.

DATA KARANG TARUNA KOTA BLITAR TAHUN 2015

NO	URAIAN	KATEGORI			JUMLAH
		KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	Karang Taruna	1	3	21	25

Sumber:Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2016

Data Pengurus Karang Taruna Kota Blitar 2015-2020

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH	
				L	P
1	Karang Taruna	26	10	36	

Sumber:Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2016

b. Panti Sosial

Panti Asuhan

No	Nama Panti Asuhan	Alamat	kapasitas	penghuni		jml
				L	P	
1.	Yayasan Harmoni	Jl. Letjen Suprapto 66 Kelurahan Tlumpu Kec. Sukorejo				
2.	Yayasan Ibadurohman	Jl. Kolonel Sugiono Gang 2 No.7 Ngegong, Kel. Gedog Kec. Sananwetan		35	32	67
3.	Panti Asuhan Ar-Rohmah	Jl. Diponegoro No. 08 Kota Blitar				47
4.	Panti Asuhan Muhammadiyah	Jl. Ir. Soekarno No.44 Blitar, Kode Pos 66133 Blitar Telp. (0342) 802516		18	40	58

5.	Yasan KYR.M.Kasiman	Jl. Masjid No. 15 Telpon 0342 801713 Blitar	tidak tinggal (binaan)			34
6.	Panti Asuhan Bustanul Muta'alimin	Jl. Sungai Hilir Timur No. 05 Telp. (0342) 805689				50
7.	PA. Mamba'us Syafaatil Qur'an	Kelurahan Gedog				
8.	Panti Asuhan Sabilul Mutadin	Jl. Suren No. 20 Plosokerep Blitar Jawa Timur Telp. 087 756 474 449				23
No	Nama Panti Asuhan	Alamat	Kapasit as	Penghu ni	Jml	
				L	P	
9.	Yayasan Tarbiyatul Falah	Jl. Manggar No. 11 RT.02 RW.08 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota				51
10.	Panti Asuhan Mamba'ul Hisan	Jl. Asahan No.52 RT.03 RW.05 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota		40	50	90
11.	Pondok Roudhotus Sholikhin					
12.	Yayasan Rukun Ginawa Santosa (Yargis) Ketua: Syaiful Bahri Tidak bermalam	Jln Kalasan No. 106, RT 05/ RW 07, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar (087759312595)		13	28	41
13.	Omah Surga	Jl. Kelud 28 Kepanjenlor, Kota Blitar				

Sumber:Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2014

c. Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Blitar

Untuk menghindari kesan buruk pada anak yang dipenjara atau ditahan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, diganti namanya mulai hari Rabu, 6 Agustus 2015. Hal ini dikarenakan, selama ini anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan selalu menuai kesan yang tidak baik dari masyarakat. Perubahan nama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Perubahan nama ini dilakukan serentak seluruh Indonesia yang terdiri kurang lebih 10 lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Kedepan anak yang akan masuk dalam

pembinaan adalah anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun.

Data personil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Blitar per April 2016

No	Variabel	L	P	Jml
1	Penghuni LPKA	116	0	116
2	Penghuni LPKA dari Kota Blitar	3	0	3
3	Jumlah orang yang berhadapan hukum	6	0	6
4	Jumlah aparat penegak hukum	47	10	57

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar, 2015

2. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)

No	Nama lembaga	Alamat
1	Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)	Jl. Dr. Soetomo No. 50 Blitar (Kantor Bapemas dan KB Kota Blitar)

Sumber: Bapemas&KB Kota Blitar, 2014

KP2A Kota Blitar berdiri pada Tahun 2011 dengan nama Lembaga Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (LPHPA)



Visi

Menjadikan KP2A sebagai Lembaga Pemberdayaan sekaligus Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terpercaya yang bekerja dengan prinsip-prinsip Kesukarelaan, Kehormatan dan Tanggung Jawab akan masa depan Perempuan dan Anak Kota Blitar “

MISI :

1. Melakukan penyadaran terhadap perempuan dan anak akan hak-haknya .
2. Mengupayakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan.
3. Mengupayakan langkah komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan advokasi kepada perempuan dan anak baik yang sudah menjadi korban maupun yang belum.
4. Mengupayakan langkah-langkah perlindungan dan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pelecehan, dan trafficking di luar peradilan.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat yang terkait dengan masalah perempuan dan anak.

Data Kejadian KDRT Tahun 2015

No	Wilayah	Jenis Kejadian														Jm I							
		Kekerasan n Sex			KDRT			Perlindu ngan Anak			Konselin g			ABH			Perkelahia n						
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	
1	Kec. Sananwetan	-	1	1	1	6	7	2	6	8	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	20	
2	Kec. Sukorejo	-	-	-	-	2	2	2	1	3	-	1	1	2	-	1	1	0	1	-	-	8	
3	Kec. Kepanjenkidul	1	1	2	-	4	4	2	2	4	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	13	
4	Luar Wilayah Kota Blitar	-	7	7	-	7	7	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	20	
	jumlah	1	9	1	1	19	2	9	10	1	3	1	4	4	-	4	-	-	1	-	-	3	61

Sumber: Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, 2015

3. Pernikahan Muda di Kota Blitar

Pernikahan muda menurut Kementerian Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon istri umur 16 – 19 tahun. Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Data Perkawinan per Kecamatan di Kota Blitar

Kecamatan/ Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Di Bawah Umum
Sukorejo	359	34	74	3
Kepanjenkidul	313	21	51	2
Sananwetan	357	36	72	10
2015	1029	91	197	15
2014	1022	96	220	11
2013	1064	115	240	20
2012	1102	89	163	23

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Blitar 2015

BAB IV **RENCANA AKSI**

4.1. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis dalam pembangunan gender di Kota Blitar antara lain:

a. Bidang Pendidikan

Isu gender di bidang pendidikan meliputi :

Di Kota Blitar, kesenjangan gender di bidang pendidikan bukan hal yang mengkhawatirkan. Hal ini karena kesempatan pendidikan dari PAUD sampai dengan SMA mendapat kesempatan dan pembebasan biaya bagi semua warga Kota Blitar baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan ada subsidi/ beasiswa bagi lulusan SMA yang mau melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi. Hanya apakah dengan pembebasan biaya pendidikan ini mempengaruhi daya saing prestasi perlu penelitian lebih lanjut.

b. Bidang Kesehatan

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- Angka kematian Bayi .

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Blitar tergolong tinggi, pada Tahun 2014 terdapat 11 bayi meninggal dari 2.165 kelahiran.

- Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Blitar dengan komposisi jumlah penduduk 145.111 jiwa tergolong tinggi. Hal ini lebih banyak disebabkan keracunan karena penyakit pre eklampsia.

- Isteri/perempuan rentan dan seringkali menjadi korban pasangannya di dalam penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lainnya di dalam rumah tangga yang akan berdampak pula terhadap anak yang dikandung. Selain itu, kurangnya akses perempuan dibandingkan laki-laki terhadap bahaya HIV AIDS, juga berkontribusi terhadap kerentanan bagi istri/perempuan.

- Kelembagaan HIV AIDS belum berfungsi secara optimal, khususnya dalam menyediakan data dan pelayanan bagi

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terinveksi dan rentan terinveksi HIV AIDS.

c. Bidang Ekonomi

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- Tingkat pengangguran terbuka banyak didominasi oleh kaum perempuan.
- Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan. Beberapa perusahaan menerapkan aturan, ketika seorang pekerja perempuan menikah, maka dia harus berhenti bekerja. Begitu juga hak cuti haid, sebagian besar pekerja perempuan tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena alasannya perusahaan tempat mereka bekerja yang kurang respon.
- Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus diperhadapkan dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih luas. Kondisi ini yang kadang membuat usaha mikro kurang mampu berkembang.
- Perencanaan pengentasan kemiskinan belum menggunakan analisis gender, masih netral gender.

d. Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- Keterwakilan perempuan di legislative belum mencapai 30%. Ini terjadi di semua kabupaten/kota.
- Fungsi dan Peran POKJA PUG yang belum optimal karena sampai dengan bulan September 2014 struktur yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di Bappeda tergabung dalam sub bidang yang menangani ekonomi, sosial, budaya sehingga masih kalah dalam perencanaan lainnya, sedangkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan di tangani sebatas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga terbatas tenaga dan alokasi anggarannya.

e. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Isu gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak relative tinggi.
- kekerasan terhadap anak , jenis kasus yang dominan yaitu kekerasan seksual.
- Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum tersedia secara optimal pada instansi-instansi terkait. Pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan, masih terbatas.
- Masih adanya diskriminasi bagi perempuan pekerja khususnya di perusahaan, terkait hak cuti haid dan melahirkan

4.2. Tujuan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar ditujukan untuk percepatan pembangunan terutama yang terkait kesenjangan gender yang sudah tertuang dalam pencapaian SDGs (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan , Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua. , Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. , Menurunkan Angka Kematian Anak , Meningkatkan Kesehatan Ibu , Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya , dan Pelestarian Lingkungan), sesuai isu strategis di setiap tujuan).

4.3. Sasaran

Rencana Aksi PUG Kota Blitar disusun untuk mencapai target sasaran :

- Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender.
- Memperkuat jaringan kelembagaan pengarustamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan.
- Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah.
- Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah.
- Tersedianya Profil Gender dan Anak Kota Blitar.

- Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kota Blitar.

Sasaran subyek/ pemangku kepentingan dari rencana aksi PUG Kota Blitar adalah:

- a. Eksekutif, yang terdiri dari Pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di Seluruh SKPD baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Legislatif di Kota Blitar
- c. Yudikasi, yaitu semua unsur penegak hukum termasuk para aparatur penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
- d. Kelompok masyarakat diantaranya Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan

4.4. Kebijakan

Tugas pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui : 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan ; 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak ; 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah; 6) Semua program SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

4.5. Strategi

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) SKPD menyusun perencanaan di mana menggunakan data terpilih, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappeda menyusun tolok ukur dan indikator kinerja ;4) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah : 1) Memastikan fungsi managemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, bimbingan teknis dan supervisi; 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan

program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah 1) SKPD melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP); 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana melakukan analisis format LAKIP yang sesuai responsig gender; 3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsive gender.

BAB V. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATRIK RENCANA DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020

Permasalahan /Issue	Kebijakan	Kegiatan	Keluaran	Penanggung Jawab	Instansi terkait	Tahun Pelaksanaan
Penguatan Kelembagaan						
Wadah atau kelembagaan yang menangani yang tentang gender masih terbatas	A. Pembentukan alat PUG	1. Pembentukan Pokja PUG dan focal point gender	Pembentukan Pokja PUG dan focal point gender	Bappeda dan Bapemas&KB	SKPD terkait	2016
Peraturan di daerah yang menjadi pedoman dan yang mengatur bidang PUG masih terbatas	B. Ketersediaan peraturan yang berspektif gender	Penyusunan Peraturan yang mengatur/ menjadi pedoman pelaksanaan PUG dan PUPA	Terbitnya Perda, Peraturan Walikota, SK Walikota tentang Implementasi PUG	Bapemas&KB	- Bappeda - Bagian Hukum - Setda - Dinsosnaker,	2017
C. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG		Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD	Laporan Monitoring Evaluasi pelaksanaan PUG SKPD	Bappeda, Irdha, BPKAD dan Bapemas&KB	seluruh SKPD dikordinasikan oleh Bappeda, Bapemas&KB, Irdha, BPKAD	2016
		Penyusunan pelaporan tentang pelaksanaan PUG terperinci SKPD dan Mengintegrasikan dimensi gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di SKPD	Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci	Bappeda, Irdha, BPKAD dan Bapemas&KB	seluruh SKPD dikordinasikan oleh Bappeda, Bapemas&KB, Irdha, BPKAD	2016-2020

Permasalahan/Isue	Kebijakan	Kegiatan	Keluaran	Penanggung Jawab	Instansi terkait	Tahun Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender						
Sebagian besar masyarakat dan pemerintah daerah belum secara prioritas pro gender	A. Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan	Penyusunan Profil Gender	Penyusunan Profil Gender	Bappeda dan Bapemas&KB	SKPD terkait	2016
	Penyusunan RAD PUG	Penyusunan RAD PUG	Bappeda	SKPD terkait	2016	
	Sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pokja PUG dan Anggota Focal Point	- sosialisasi PUG secara tatap muka, Seminar, lokakarya, workshop, diskusi publik,buku/leaflet/booklet	- Bapemas&KB, Irda, BPKAD dan Bappeda	seluruh SKPD, instansi vertikal	2016-2020	
	penyebarluasan panduan teknis pelaksanaan PUG	Panduan teknis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Bapemas&KB	seluruh SKPD, instansi vertikal	2016-2020	
	Pelatihan/TOT bagi SKPD terkait PUG	Pelatihan/TOT bagi SKPD terkait PUG	Tim Driver	SKPD terkait dan instansi vertikal	2016-2020	
Wadah atau kelembagaan yang menangani tentang gender masih terbatas	C. Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan fungsi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) menjadi pelayanan terpadu PP dan PA	peningkatan koordinasi pokja PUG	Bapemas&KB Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPA	2016-2020	

BAB VI

RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Monitoring menurut WHO adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Monitoring evaluasi dilaksanakan melalui hasil laporan pelaksanaan PUG setiap semester atau setiap tahun dari SKPD dengan indikator (indikator akan dievaluasi sesuai kebutuhan setiap tahun) sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Keterangan
1	Kelembagaan	Peraturan apa saja yang sudah disusun	dievaluasi setiap tahun
2	Perencanaan	Berapa SKPD yang Renstra, Renjanya sudah mengacu pada RAD PUG	dievaluasi setiap tahun
3	Penganggaran	Berapa SKPD yang DPA, KAK sudah mengacu pada PPRG	dievaluasi setiap tahun
4	Data Terpilah	tersedia data terpilah gender	dievaluasi setiap tahun

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kepada semua kalangan. Membahas tentang pengarusutamaan gender bukan mengenai jenis kelamin, namun membahas terhadap aspek kesempatan, partisipasi, manfaat dan fasilitasi terhadap semua bidang pembangunan yang dapat diakses oleh tua, muda, laki-laki, perempuan, normal, cacat dan lain sebagainya.

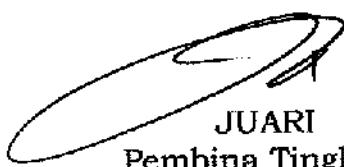
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) disusun guna melihat gambaran pengarusutamaan gender di Kota Blitar serta mempetakan kebijakan Pemerintah Kota Blitar dengan melihat program kegiatan yang mendukung isu ini ke dalam program pembangunan sehingga dapat disusun prioritas program untuk pelaksanaan setiap tahunnya. RAD PUG Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ini semoga mampu memberikan pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang memenuhi hak semua elemen baik perempuan, laki-laki, tua, muda, anak-anak, normal, disabilitas, dan lainnya sehingga memiliki kesempatan yang sama.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



JUARI
Pembina Tingkat I
19651204 198603 1 006